

**TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN TERKAIT LARANGAN
RANGKAP JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN
USAHA MILIK NEGARA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Hukum Dengan Kekhususan HTN / HAN



Oleh :

FARIKA QODRUNNADA FITRIANI

201920031

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN TERKAIT LARANGAN
RANGKAP JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA
BADAN USAHA MILIK NEGARA
SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM TATA NEGARA/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Oleh:

FARIKA QODRUNNADA FITRIANI

201920031

Kudus, 10 Agustus 2024

Disetujui:

Pembimbing I

Lidya Christina W., S.H., M.H., M.Kn.

NIDN.0617029102

Pembimbing II

Marsatana Tartila Tristy, S.H., M.H.

NIDN.0607039501

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muria Kudus

Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.

NIDN.0613046101

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farika Qodrunnada Fitriani

NIM : 201920031

Alamat : Desa Dersalam, Kec. Bae, Kab. Kudus

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pengaturan Terkait Larangan Rangkap Jabatan Aparatur Sipil Negara Pada Badan Usaha Milik Negara

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 10 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Farika Qodrunnada Fitriani

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Orang lain ga akan bisa paham *struggle* dan masa sulit nya kita mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.”

Kupersembahkan Untuk:

1. Bapak Subiyanto dan Ibu Muslimahtun selaku kedua orang tua yang sangat penulis cintai dan sayangi. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dukungan.
2. Kakakku Ferryan Erlangga dan Lely Puji Apriyanti. Terimakasih atas dukungan serta memberikan doa dan kasih sayang.
3. Saudaraku Talita Zahrotussita, Keponakanku Arjuna Maulana Ibrahim dan Afanin Putri Fellicia. Terimakasih yang selalu memberikan semangat dan dukungan selalu untuk penulis.
4. Sahabat-sahabatku yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas bantuan memberi semangat, dukungan serta doa terbaiknya.
5. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2019.
6. Semua anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum tahun 2022.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat, karunia berupa kesehatan, serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pengaturan Terkait Larangan Rangkap Jabatan Aparatur Sipil Negara Pada Badan Usaha Milik Negara”.

Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi tugas guna menyelesaikan Studi Program Srata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Darsono, M.Si., selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Univeritas Muria Kudus.
3. Bapak Suyoto, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang senantiasa mengarahkan, memotivasi penulis sehingga skripsi ini dapat tersusun.
4. Ibu Lidya Christina Wardhani, S.H., M.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu serta membimbing secara langsung sejak awal sampai akhir penulisan sehingga penulisan skripsi ini dapat tersusun dan terselesaikan.
5. Ibu Marsatana Tartila Tristy, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu serta mengarahkan dan

membimbing, sehingga penulisan skripsi ini dapat tersusun dan terselesaikan.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberika ilmu selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Mengingat penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka segala kritik dan saran positif akan penulis terima dengan senang hati.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca.

Kudus, 10 Agustus 2024

Farika Qodrunnada Fitriani

ABSTRAK

Skripsi berjudul “TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN TERKAIT LARANGAN RANGKAP JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA” secara umum bertujuan mengetahui bagaimana pengaturan terkait larangan Aparatur Sipil Negara yang merangkap jabatan pada Badan Usaha Milik Negara dan untuk mengetahui bagaimana pengawasan pelaksanaan pengaturan terkait Aparatur Sipil Negara yang merangkap jabatan pada Badan Usaha Milik Negara.

Skripsi ini mengambil metode penelitian hukum yuridis-normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi pustaka terkait bahan hukum yang berfokus pada penelitian. Sumber data yang digunakan peneliti berupa data sekunder. Data sekunder yang digunakan penulis berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa Pengaturan terkait larangan Aparatur Sipil Negara yang merangkap jabatan pada Badan Usaha Milik Negara secara tegas melarang ASN merangkap jabatan pada BUMN. Namun, di ranah implementasinya Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 yang memperbolehkan adanya rangkap jabatan pada BUMN masih dilaksanakan meskipun sudah dicabut. Pengawasan pelaksanaan pengaturan terkait ASN yang merangkap jabatan pada BUMN dilakukan oleh Ombudsman dan Komisi Aparatur Sipil Negara. Pengawasan pelaksana pengaturan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang – undangan dan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Kata Kunci: Rangkap Jabatan, Aparatur Sipil Negara, Badan Usaha Milik Negara

ABSTRACT

The thesis entitled "JURIDICAL REVIEW OF REGULATIONS RELATED TO THE PROHIBITION OF CONCURRENT POSITIONS OF STATE CIVIL SERVANTS IN STATE-OWNED ENTERPRISES" in general aims to find out how regulations are related to the prohibition of state civil servants who concurrently hold positions in state-owned enterprises and to find out how to supervise the implementation of regulations related to state civil apparatus who concurrently hold positions in state-owned enterprises.

This thesis takes juridical-normative legal research methods and analytical descriptive research regulations. The data collection method in this study uses literature studies related to legal materials that focus on research. The data source used by the researcher is in the form of secondary data. The secondary data used by the author is in the form of primary legal materials and secondary legal materials.

Based on the results of the study, it can be shown that the regulation related to the prohibition of State Civil Apparatus who concurrently holds positions in State-Owned Enterprises expressly prohibits ASN from concurrently holding positions in SOEs. However, in the realm of implementation, the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-10/MBU/10/2020 which allows the existence of dual positions in SOEs is still implemented even though it has been revoked. Supervision of the implementation of regulations related to ASN who concurrently hold positions in SOEs is carried out by the Ombudsman and the State Civil Apparatus Commission. Supervision of the implementation of regulations is carried out based on laws and regulations and the General Principles of Good Governance (AAUPB).

Keywords: *Dual Positions, State Civil Apparatus, State-Owned Enterprises*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Aparatur Sipil Negara.....	13
1. Definisi Aparatur Sipil Negara (ASN).....	13
2. Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN).....	14
3. Hak – Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN).....	16
B. Rangkap Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN).....	18
1. Definisi Rangkap Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN)	18
2. Konflik Kepentingan Rangkap Jabatan ASN	19
C. Badan Usaha Milik Negara (BUMN).....	20
1. Pengertian Badan Usaha Milik Negara.....	20

2. Jabatan Direksi dan Komisaris.....	21
D. Peraturan Perundang-Undangan.....	22
1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan	22
2. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Metode Pendekatan	25
B. Spesifikasi Penelitian	26
C. Metode Pengumpulan Data	26
1. Bahan hukum primer.....	26
2. Bahan hukum sekunder.....	27
D. Metode pengolahan dan penyajian data	28
E. Metode Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Pengaturan terkait larangan Aparatur Sipil Negara yang merangkap jabatan pada Badan Usaha Milik Negara.....	29
B. Pengawasan pelaksanaan pengaturan terkait Aparatur Sipil Negara yang merangkap jabatan pada Badan Usaha Milik Negara	40
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	55